

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGINPUTAN KEUANGAN PERKARA DI APLIKASI
KOMDANAS DAN PELAPORAN ELEKTRONIK**



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
JANUARI TAHUN 2021**

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGINPUTAN
KEUANGAN PERKARA DI KOMDANAS DAN PELAPORAN
KEUANGAN ELEKTRONIK**

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang terlebih dahulu harus dibayar pihak ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh Peradilan sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara (biaya kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara lain seperti biaya eksekusi, konsinyiasi/titipan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pihak ke III.

Dalam rangka memenuhi unsur keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan secara intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang dihimpun oleh dirjen-dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi pengadilan.

B. DASAR HUKUM

1. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 413/DJU/PS.01/5/2018 Tentang Pelaporan Keuangan Biaya Perkara ke Komdanas tiap bulan
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum) tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK.HM.02.3/9/2009 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di Peradilan Umum.

C. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

| No | Kondisi/Temuan | Penyebab | Solusi/Tindak Lanjut | Evidence |
|----|--|----------|----------------------|--|
| 1 | Aplikasi Komdanas tidak ada temuan, penginputan keuangan perkara di aplikasi Komdanas dilakukan tepat waktu minimal tanggal 1 di bulan berikutnya. | - | - | Print out Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Perkara |
| 2 | Aplikasi Pelaporan Keuangan Secara Elektronik di website Badilum tidak ada temuan | - | | Screenshot Website Pelaporan Elektronik |

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penginputan biaya perkara di aplikasi Komdanas dan Pelaporan Elektronik Keuangan Perkara di website Badilum perlu dipertahankan dalam rangka tertib pelaporan keuangan perkara.

BANTUL, 5 JANUARI 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL

PANITERA



RUDI SAFARI, S.H, M.H

NIP. 196606091996031002

Palang Merah Indonesia (PMI) - Google Chrome

Not secure | palangmerahindonesia.org

| | | | | | |
|----|---------------|---------------------------------|------------|---|---|
| 18 | PJ Semarang | PK Liris | 30/12/2020 | ✓ | ✓ |
| 19 | PJ Semarang | PK Pambaca | 04/08/2021 | ✓ | ✓ |
| 20 | PJ Semarang | PK Cibrau | 30/02/2020 | ✓ | ✓ |
| 21 | PJ Semarang | PK Banyuwangi | 04/08/2021 | ✓ | ✓ |
| 22 | PJ Semarang | PK Pahlawan | 30/02/2020 | ✓ | ✓ |
| 23 | PJ Semarang | PK Banjarnegara | 30/02/2020 | ✓ | ✓ |
| 24 | PJ Semarang | PK Kabupaten Jepu Di Sam | 04/08/2021 | ✓ | ✓ |
| 25 | PJ Semarang | PK Kabupaten Karang D. Mangrove | 04/08/2021 | ✓ | ✓ |
| 26 | PJ Yogyakarta | PK Yogyakarta | 05/08/2021 | ✓ | ✓ |
| 27 | PJ Yogyakarta | PK Wates | 04/07/2021 | ✓ | ✓ |
| 28 | PJ Yogyakarta | PK Kulon | 04/08/2021 | ✓ | ✓ |
| 29 | PJ Yogyakarta | PK Selayat | 04/07/2021 | ✓ | ✓ |
| 30 | PJ Yogyakarta | PK Jember | 30/12/2020 | ✓ | ✓ |
| 31 | PJ Surabaya | PK Sidoarjo | 30/02/2020 | ✓ | ✓ |
| 32 | PJ Surabaya | PK Bojonegara | 30/10/2020 | ✓ | ✓ |
| 33 | PJ Surabaya | PK Genuk | 04/08/2021 | ✓ | ✓ |
| 34 | PJ Surabaya | PK Lumajang | 04/07/2021 | ✓ | ✓ |
| 35 | PJ Surabaya | PK Gresik | 30/02/2020 | ✓ | ✓ |
| 36 | PJ Surabaya | PK Sidoarjo | 30/10/2020 | ✓ | ✓ |
| 37 | PJ Surabaya | PK Gresik | 30/02/2020 | ✓ | ✓ |
| 38 | PJ Surabaya | PK Sidoarjo | 30/10/2020 | ✓ | ✓ |
| 39 | PJ Surabaya | PK Jember | 30/12/2020 | ✓ | ✓ |



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGINPUTAN KEUANGAN PERKARA DI APLIKASI
KOMDANAS DAN PELAPORAN ELEKTRONIK**



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
FEBRUARI TAHUN 2021**

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGINPUTAN
KEUANGAN PERKARA DI KOMDANAS DAN PELAPORAN
KEUANGAN ELEKTRONIK**

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang terlebih dahulu harus dibayar pihak ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh Peradilan sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara (biaya kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara lain seperti biaya eksekusi, konsinyiasi/titipan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pihak ke III.

Dalam rangka memenuhi unsur keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan secara intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang dihimpun oleh dirjen-dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi pengadilan.

B. DASAR HUKUM

1. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 413/DJU/PS.01/5/2018 Tentang Pelaporan Keuangan Biaya Perkara ke Komdanas tiap bulan
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum) tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK.HM.02.3/9/2009 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di Peradilan Umum.

C. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

| No | Kondisi/Temuan | Penyebab | Solusi/Tindak Lanjut | Evidence |
|----|--|----------|----------------------|--|
| 1 | Aplikasi Komdanas tidak ada temuan, penginputan keuangan perkara di aplikasi Komdanas dilakukan tepat waktu minimal tanggal 1 di bulan berikutnya. | - | - | Print out Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Perkara |
| 2 | Aplikasi Pelaporan Keuangan Secara Elektronik di website Badilum tidak ada temuan | - | - | Screenshot Website Pelaporan Elektronik |

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penginputan biaya perkara di aplikasi Komdanas dan Pelaporan Elektronik Keuangan Perkara di website Badilum perlu dipertahankan dalam rangka tertib pelaporan keuangan perkara.

BANTUL, 5 FEBRUARI 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL
PANITERA



RUDI SAFARI, S.H, M.H
NIP. 196606091996031002

Report: Salesperson - Salesperson - Salesperson - Salesperson - Salesperson

Search for a search

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

1

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGINPUTAN KEUANGAN PERKARA DI APLIKASI
KOMDANAS DAN PELAPORAN ELEKTRONIK**



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
MARET TAHUN 2021**

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGINPUTAN
KEUANGAN PERKARA DI KOMDANAS DAN PELAPORAN
KEUANGAN ELEKTRONIK**

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang terlebih dahulu harus dibayar pihak ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh Peradilan sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara (biaya kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara lain seperti biaya eksekusi, konsinyasi/titipan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pihak ke III.

Dalam rangka memenuhi unsur keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan secara intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang dihimpun oleh dirjen-dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi pengadilan.

B. DASAR HUKUM

1. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 413/DJU/PS.01/5/2018 Tentang Pelaporan Keuangan Biaya Perkara ke Komdanas tiap bulan
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum) tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK.HM.02.3/9/2009 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di Peradilan Umum.

C. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

| No | Kondisi/Temuan | Penyebab | Solusi/Tindak Lanjut | Evidence |
|----|--|----------|----------------------|--|
| 1 | Aplikasi Komdanas tidak ada temuan, penginputan keuangan perkara di aplikasi Komdanas dilakukan tepat waktu minimal tanggal 1 di bulan berikutnya. | - | - | Print out Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Perkara |
| 2 | Aplikasi Pelaporan Keuangan Secara Elektronik di website Badilum tidak ada temuan | - | | Screenshot Website Pelaporan Elektronik |

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penginputan biaya perkara di aplikasi Komdanas dan Pelaporan Elektronik Keuangan Perkara di website Badilum perlu dipertahankan dalam rangka tertib pelaporan keuangan perkara.

BANTUL, 5 MARET 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL
PANITERA



RUDI SAFARI, S.H, M.H
NIP. 196606091996031002

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGINPUTAN KEUANGAN PERKARA DI APLIKASI
KOMDANAS DAN PELAPORAN ELEKTRONIK**



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
APRIL TAHUN 2021**

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGINPUTAN
KEUANGAN PERKARA DI KOMDANAS DAN PELAPORAN
KEUANGAN ELEKTRONIK

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang terlebih dahulu harus dibayar pihak ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh Peradilan sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara (biaya kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara lain seperti biaya eksekusi, konsinyasi/titipan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pihak ke III.

Dalam rangka memenuhi unsur keterbukaan (transparasi) dalam pengelolaan biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan secara intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang dihimpun oleh Dirjen Dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi pengadilan.

B. DASAR HUKUM

1. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 413/DJU/PS.01/5/2018 Tentang Pelaporan Keuangan Biaya Perkara ke Komdanas tiap bulan
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum) tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK.HM.02.3/9/2009 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di Peradilan Umum.

C. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

| No | Kondisi/Temuan | Penyebab | Solusi/Tindak Lanjut | Evidence |
|----|--|----------|----------------------|--|
| 1 | Aplikasi Komdanas tidak ada temuan, penginputan keuangan perkara di aplikasi Komdanas dilakukan tepat waktu minimal tanggal 1 di bulan berikutnya. | - | - | Print out Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Perkara |
| 2 | Aplikasi Pelaporan Keuangan Secara Elektronik di website Badilum tidak ada temuan | - | | Screenshoot Website Pelaporan Elektronik |

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penginputan biaya perkara di aplikasi Komdanas dan Pelaporan Elektronik Keuangan Perkara di website Badilum perlu dipertahankan dalam rangka tertib pelaporan keuangan perkara.

BANTUL, 5 APRIL 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL



RUDI SAFARI, S.H, M.H
NIP. 196606091996031002

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGINPUTAN KEUANGAN PERKARA DI APLIKASI
KOMDANAS DAN PELAPORAN ELEKTRONIK**



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
MEI TAHUN 2021**

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGINPUTAN
KEUANGAN PERKARA DI KOMDANAS DAN PELAPORAN
KEUANGAN ELEKTRONIK**

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang terlebih dahulu harus dibayar pihak ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh Peradilan sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara (biaya kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara lain seperti biaya eksekusi, konsinyiasi/titipan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pihak ke III.

Dalam rangka memenuhi unsur keterbukaan (transparasi) dalam pengelolaan biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan secara intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang dihimpun oleh dirjen-dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi pengadilan.

B. DASAR HUKUM

1. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 413/DJU/PS.01/5/2018 Tentang Pelaporan Keuangan Biaya Perkara ke Komdanas tiap bulan
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum) tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK.HM.02.3/9/2009 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di Peradilan Umum.

C. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

| No | Kondisi/Temuan | Penyebab | Solusi/Tindak Lanjut | Evidence |
|----|--|----------|----------------------|--|
| 1 | Aplikasi Komdanas tidak ada temuan, penginputan keuangan perkara di aplikasi Komdanas dilakukan tepat waktu minimal tanggal 1 di bulan berikutnya. | - | - | Print out Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Perkara |
| 2 | Aplikasi Pelaporan Keuangan Secara Elektronik di website Badilum tidak ada temuan | - | - | Screenshot Website Pelaporan Elektronik |

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penginputan biaya perkara di aplikasi Komdanas dan Pelaporan Elektronik Keuangan Perkara di website Badilum perlu dipertahankan dalam rangka tertib pelaporan keuangan perkara.

BANTUL, 5 MEI 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL

PANITERA



RUDI SAFARI, S.H, M.H
NIP. 196606091996031002

Peleporan Bencorik District, andrei Bazar Peleporan Umum - Google Chrome

Not secure peleporan.badilumrahkamalagup.go.id/infokeluargaperseorai

| | | | | | |
|----|--------------|-------------------------------|----------|---|---|
| 76 | P' Senang | Pi Clap | 04/02/20 | ✓ | ✓ |
| 77 | P' Senang | Pi Senora | 03/02/20 | ✓ | ✓ |
| 78 | P' Senang | Pi Antologi | 03/02/20 | ✓ | ✓ |
| 79 | P' Senang | Pi Sanangga | 03/02/20 | ✓ | ✓ |
| 80 | P' Senang | Pi Kabupaten Tegal Di Sisa | 03/02/20 | ✓ | ✓ |
| 81 | P' Senang | Pi Kabupaten Pajang Di Rungit | 03/02/20 | ✓ | ✓ |
| 82 | P' Tegalreah | Pi Tegalreah | 04/02/20 | ✓ | ✓ |
| 83 | P' Tegalreah | Pi Wita | 03/02/20 | ✓ | ✓ |
| 84 | P' Tegalreah | Pi Bencor | 03/02/20 | ✓ | ✓ |
| 85 | P' Tegalreah | Pi Senan | 03/02/20 | ✓ | ✓ |
| 86 | P' Tegalreah | Pi Benc | 03/02/20 | ✓ | ✓ |
| 87 | P' Sundaia | Pi Sundaia | 03/02/20 | ✓ | ✓ |
| 88 | P' Sundaia | Pi Sundaia | 03/02/20 | ✓ | ✓ |
| 89 | P' Sundaia | Pi Lian | 03/02/20 | ✓ | ✓ |
| 90 | P' Sundaia | Pi Langoa | 03/02/20 | ✓ | ✓ |
| 91 | P' Sundaia | Pi Gek | 03/02/20 | ✓ | ✓ |
| 92 | P' Sundaia | Pi Sinda | 03/02/20 | ✓ | ✓ |
| 93 | P' Sundaia | Pi Mupera | 03/02/20 | ✓ | ✓ |
| 94 | P' Sundaia | Pi Sundaia | 03/02/20 | ✓ | ✓ |
| 95 | P' Sundaia | Pi Sundaia | 03/02/20 | ✓ | ✓ |
| 96 | P' Sundaia | Pi Sunda | 03/02/20 | ✓ | ✓ |
| 97 | P' Sundaia | Pi Sundaia | 03/02/20 | ✓ | ✓ |



Type here to search

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGINPUTAN KEUANGAN PERKARA DI APLIKASI
KOMDANAS DAN PELAPORAN ELEKTRONIK**



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
JUNI TAHUN 2021**

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGINPUTAN
KEUANGAN PERKARA DI KOMDANAS DAN PELAPORAN
KEUANGAN ELEKTRONIK**

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang terlebih dahulu harus dibayar pihak ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh Peradilan sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara (biaya kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara lain seperti biaya eksekusi, konsinyasi/titipan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pihak ke III.

Dalam rangka memenuhi unsur keterbukaan (transparasi) dalam pengelolaan biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan secara intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang dihimpun oleh dirjen-dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi pengadilan.

B. DASAR HUKUM

1. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 413/DJU/PS.01/5/2018 Tentang Pelaporan Keuangan Biaya Perkara ke Komdanas tiap bulan
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum) tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK.HM.02.3/9/2009 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di Peradilan Umum.

C. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

| No | Kondisi/Temuan | Penyebab | Solusi/Tindak Lanjut | Evidence |
|----|--|----------|----------------------|--|
| 1 | Aplikasi Komdanas tidak ada temuan, penginputan keuangan perkara di aplikasi Komdanas dilakukan tepat waktu minimal tanggal 1 di bulan berikutnya. | - | - | Print out Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Perkara |
| 2 | Aplikasi Pelaporan Keuangan Secara Elektronik di website Badilum tidak ada temuan | - | - | Screenshot Website Pelaporan Elektronik |

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penginputan biaya perkara di aplikasi Komdanas dan Pelaporan Elektronik Keuangan Perkara di website Badilum perlu dipertahankan dalam rangka tertib pelaporan keuangan perkara.

BANTUL, 4 JUNI 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL

PANITERA



RUDI SAFARI, S.H, M.H
NIP. 196606091996031002

| No | Instansi | Instansi | Tgl Pengiriman | Status | Status |
|-----|-------------|------------------------------|----------------|--------|--------|
| 118 | PT Semarang | PT Kalselaga | 02/06/2021 | ✓ | ✓ |
| 119 | PT Semarang | PT Kalselaga | 02/06/2021 | ✓ | ✓ |
| 120 | PT Semarang | PT Kalselaga Pnglisa Sisa | 02/06/2021 | ✓ | ✓ |
| 18 | PT Semarang | PT Kalselaga Mnglisa Pnglisa | 02/06/2021 | ✓ | ✓ |
| 32 | PT Sigulaha | PT Sigulaha | 02/06/2021 | ✓ | ✓ |
| 43 | PT Sigulaha | PT Sigulaha | 02/06/2021 | ✓ | ✓ |
| 54 | PT Sigulaha | PT Sigulaha | 02/06/2021 | ✓ | ✓ |
| 55 | PT Sigulaha | PT Sigulaha | 02/06/2021 | ✓ | ✓ |
| 56 | PT Sigulaha | PT Sigulaha | 02/06/2021 | ✓ | ✓ |
| 57 | PT Sigulaha | PT Sigulaha | 02/06/2021 | ✓ | ✓ |
| 58 | PT Sigulaha | PT Sigulaha | 02/06/2021 | ✓ | ✓ |
| 49 | PT Sigulaha | PT Sigulaha | 02/06/2021 | ✓ | ✓ |
| 50 | PT Sigulaha | PT Sigulaha | 02/06/2021 | ✓ | ✓ |
| 51 | PT Sigulaha | PT Sigulaha | 02/06/2021 | ✓ | ✓ |

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGINPUTAN KEUANGAN PERKARA DI APLIKASI
KOMDANAS DAN PELAPORAN ELEKTRONIK**



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
JULI TAHUN 2021**

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGINPUTAN
KEUANGAN PERKARA DI KOMDANAS DAN PELAPORAN
KEUANGAN ELEKTRONIK**

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang terlebih dahulu harus dibayar pihak ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh Peradilan sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara (biaya kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara lain seperti biaya eksekusi, konsinyiasi/titipan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pihak ke III.

Dalam rangka memenuhi unsur keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan secara intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang dihimpun oleh dirjen-dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi pengadilan.

B. DASAR HUKUM

1. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 413/DJU/PS.01/5/2018 Tentang Pelaporan Keuangan Biaya Perkara ke Komdanas tiap bulan
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum) tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK.HM.02.3/9/2009 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di Peradilan Umum.

C. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

| No | Kondisi/Temuan | Penyebab | Solusi/Tindak Lanjut | Evidence |
|----|--|----------|----------------------|--|
| 1 | Aplikasi Komdanas tidak ada temuan, penginputan keuangan perkara di aplikasi Komdanas dilakukan tepat waktu minimal tanggal 1 di bulan berikutnya. | - | - | Print out Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Perkara |
| 2 | Aplikasi Pelaporan Keuangan Secara Elektronik di website Badilum tidak ada temuan | - | - | Screenshot Website Pelaporan Elektronik |

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penginputan biaya perkara di aplikasi Komdanas dan Pelaporan Elektronik Keuangan Perkara di website Badilum perlu dipertahankan dalam rangka tertib pelaporan keuangan perkara.

BANTUL, 5 JULI 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL

PANITERA



RUDI SAFARI, S.H, M.H

NIP. 196606091996031002

Tip here to search

| | | | | |
|-----|---------------|----------------------------------|------------|--|
| 181 | PT Surabaya | PN Gresik | 01/07/2021 | |
| 190 | PT Surabaya | PN Lamongan | 01/07/2021 | |
| 189 | PT Surabaya | PN Tuban | 01/07/2021 | |
| 188 | PT Surabaya | PN Bojonegara | 01/07/2021 | |
| 187 | PT Surabaya | PN Surabaya | 01/07/2021 | |
| 186 | PT Yogyakarta | PN Bantul | 01/07/2021 | |
| 185 | PT Yogyakarta | PN Sleman | 02/07/2021 | |
| 184 | PT Yogyakarta | PN Wonorejo | 02/07/2021 | |
| 183 | PT Yogyakarta | PN Wates | 01/07/2021 | |
| 182 | PT Yogyakarta | PN Yogyakarta | 02/07/2021 | |
| 181 | PT Semarang | PN Kabupaten Magelang Di Mungkid | 01/07/2021 | |
| 180 | PT Semarang | PN Kabupaten Tegal Di Siam | 01/07/2021 | |
| 179 | PT Semarang | PN Banjarnegara | 01/07/2021 | |
| 178 | PT Semarang | PN Purabaya | 01/07/2021 | |

18/11/2021 10:00:00 AM

Myanmar Business Director - Jawa Barat - PT Telkom Indonesia - Google Chrome

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGINPUTAN KEUANGAN PERKARA DI APLIKASI
KOMDANAS DAN PELAPORAN ELEKTRONIK**



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
AGUSTUS TAHUN 2021**

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGINPUTAN
KEUANGAN PERKARA DI KOMDANAS DAN PELAPORAN
KEUANGAN ELEKTRONIK**

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang terlebih dahulu harus dibayar pihak ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh Peradilan sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara (biaya kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara lain seperti biaya eksekusi, konsinyasi/titipan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pihak ke III.

Dalam rangka memenuhi unsur keterbukaan (transparasi) dalam pengelolaan biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan secara intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang dihimpun oleh dirjen-dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi pengadilan.

B. DASAR HUKUM

1. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 413/DJU/PS.01/5/2018 Tentang Pelaporan Keuangan Biaya Perkara ke Komdanas tiap bulan
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum) tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK.HM.02.3/9/2009 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di Peradilan Umum.

C. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

| No | Kondisi/Temuan | Penyebab | Solusi/Tindak Lanjut | Evidence |
|----|--|----------|----------------------|--|
| 1 | Aplikasi Komdanas tidak ada temuan, penguatan keuangan perkara di aplikasi Komdanas dilakukan tepat waktu minimal tanggal 1 di bulan berikutnya. | - | - | Print out Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Perkara |
| 2 | Aplikasi Pelaporan Keuangan Secara Elektronik di website Badilum tidak ada temuan | - | | Screenshot Website Pelaporan Elektronik |

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penguatan biaya perkara di aplikasi Komdanas dan Pelaporan Elektronik Keuangan Perkara di website Badilum perlu dipertahankan dalam rangka tertib pelaporan keuangan perkara.

BANTUL, 5 AGUSTUS 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL
PANITERA



RUDI SAFARI, S.H, M.H
NIP. 196606091996031002

Microsoft Excel - Sheet1.xlsx - Nama: Hani Nur Hafidha, NPM: 090220210001

File Home Insert Page Layout Formulas Data Window Help

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

| | | | | | |
|----|-------------|-----------------------------|------------|---|---|
| 18 | PT Semarang | PN Balikpapan | 01/08/2021 | ✓ | ✓ |
| 19 | PT Semarang | PN Kabupaten Ngali'o Sulu | 01/08/2021 | ✓ | ✓ |
| 20 | PT Semarang | PN Kabupaten Ngali'o Mangid | 01/08/2021 | ✓ | ✓ |
| 21 | PT Ngali'o | PN Ngali'o | 01/08/2021 | ✓ | ✓ |
| 22 | PT Ngali'o | PN Walea | 01/08/2021 | ✓ | ✓ |
| 23 | PT Ngali'o | PN Makassar | 04/08/2021 | ✓ | ✓ |
| 24 | PT Ngali'o | PN Selayar | 01/08/2021 | ✓ | ✓ |
| 25 | PT Ngali'o | PN Selayar | 01/08/2021 | ✓ | ✓ |
| 26 | PT Ngali'o | PN Bidad | 30/07/2021 | ✓ | ✓ |
| 27 | PT Selayar | PN Selayar | 01/08/2021 | ✓ | ✓ |
| 28 | PT Selayar | PN Balikpapan | 01/08/2021 | ✓ | ✓ |
| 29 | PT Selayar | PN Walea | 01/08/2021 | ✓ | ✓ |
| 30 | PT Selayar | PN Makassar | 01/08/2021 | ✓ | ✓ |
| 31 | PT Selayar | PN Gales | 01/08/2021 | ✓ | ✓ |
| 32 | PT Selayar | PN Selayar | 01/08/2021 | ✓ | ✓ |

100

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGINPUTAN KEUANGAN PERKARA DI APLIKASI
KOMDANAS DAN PELAPORAN ELEKTRONIK**



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
SEPTEMBER TAHUN 2021**

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGINPUTAN
KEUANGAN PERKARA DI KOMDANAS DAN PELAPORAN
KEUANGAN ELEKTRONIK**

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang terlebih dahulu harus dibayar pihak ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh Peradilan sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara (biaya kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara lain seperti biaya eksekusi, konsinyasi/titipan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pihak ke III.

Dalam rangka memenuhi unsur keterbukaan (transparasi) dalam pengelolaan biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan secara intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang dihimpun oleh dirjen-dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi pengadilan.

B. DASAR HUKUM

1. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 413/DJU/PS.01/5/2018 Tentang Pelaporan Keuangan Biaya Perkara ke Komdanas tiap bulan
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum) tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK.HM.02.3/9/2009 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di Peradilan Umum.

C. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

| No | Kondisi/Temuan | Penyebab | Solusi/Tindak Lanjut | Evidence |
|----|--|----------|----------------------|--|
| 1 | Aplikasi Komdanas tidak ada temuan, penginputan keuangan perkara di aplikasi Komdanas dilakukan tepat waktu minimal tanggal 1 di bulan berikutnya. | - | - | Print out Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Perkara |
| 2 | Aplikasi Pelaporan Keuangan Secara Elektronik di website Badilum tidak ada temuan | - | - | Screenshot Website Pelaporan Elektronik |

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penginputan biaya perkara di aplikasi Komdanas dan Pelaporan Elektronik Keuangan Perkara di website Badilum perlu dipertahankan dalam rangka tertib pelaporan keuangan perkara.

BANTUL, 3 SEPTEMBER 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL
PANITERA



RUDI SAFARI, S.H, M.H
NIP. 196606091996031002

Address: Elektronik Direktorat Jenderal Baten Persekitan Umum - Google Chrome

Not secure | pelepasan.balidunum.kemahapunggsat.kemahapunggsat.go.id

| | | | | | | |
|-----|---------------|----------------------------------|------------|---|---|---|
| 177 | PT Semarang | PN Banyuwangi | 01/09/2021 | ✓ | ✓ | |
| 178 | PT Semarang | PN Purbalangga | 01/09/2021 | ✓ | ✓ | |
| 179 | PT Semarang | PN Banjarnegara | 01/09/2021 | ✓ | ✓ | |
| 180 | PT Semarang | PN Kabupaten Tegal Di Slati | 31/08/2021 | ✓ | ✓ | |
| 181 | PT Semarang | PN Kabupaten Magelang Di Mangkud | 01/09/2021 | ✓ | ✓ | |
| 182 | PT Yogyakarta | PN Yogyakarta | 02/09/2021 | ✓ | ✓ | |
| 183 | PT Yogyakarta | PN Wates | 02/09/2021 | ✓ | ✓ | |
| 184 | PT Yogyakarta | PN Wonosari | 02/09/2021 | ✓ | ✓ | |
| 185 | PT Yogyakarta | PN Sleman | 01/09/2021 | ✓ | ✓ | |
| 186 | PT Yogyakarta | PN Bantul | 31/08/2021 | ✓ | ✓ | ← |
| 187 | PT Surabaya | PN Surabaya | 01/09/2021 | ✓ | ✓ | |
| 188 | PT Surabaya | PN Bojonegoro | 01/09/2021 | ✓ | ✓ | |
| 189 | PT Surabaya | PN Tuban | 02/09/2021 | ✓ | ✓ | |
| 190 | PT Surabaya | PN Lamongan | 01/09/2021 | ✓ | ✓ | |
| 191 | PT Surabaya | PN Gresik | 01/09/2021 | ✓ | ✓ | |

Type here to search

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGINPUTAN KEUANGAN PERKARA DI APLIKASI
KOMDANAS DAN PELAPORAN ELEKTRONIK**



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
OKTOBER TAHUN 2021**

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGINPUTAN
KEUANGAN PERKARA DI KOMDANAS DAN PELAPORAN
KEUANGAN ELEKTRONIK**

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang terlebih dahulu harus dibayar pihak ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh Peradilan sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara (biaya kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara lain seperti biaya eksekusi, konsinyasi/titipan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pihak ke III.

Dalam rangka memenuhi unsur keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan secara intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang dihimpun oleh dirjen-dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi pengadilan.

B. DASAR HUKUM

1. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 413/DJU/PS.01/5/2018 Tentang Pelaporan Keuangan Biaya Perkara ke Komdanas tiap bulan
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum) tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK.HM.02.3/9/2009 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di Peradilan Umum.

C. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

| No | Kondisi/Temuan | Penyebab | Solusi/Tindak Lanjut | Evidence |
|----|--|----------|----------------------|--|
| 1 | Aplikasi Komdanas tidak ada temuan, penginputan keuangan perkara di aplikasi Komdanas dilakukan tepat waktu minimal tanggal 1 di bulan berikutnya. | - | - | Print out Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Perkara |
| 2 | Aplikasi Pelaporan Keuangan Secara Elektronik di website Badilum tidak ada temuan | - | | Screenshot Website Pelaporan Elektronik |

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penginputan biaya perkara di aplikasi Komdanas dan Pelaporan Elektronik Keuangan Perkara di website Badilum perlu dipertahankan dalam rangka tertib pelaporan keuangan perkara.

BANTUL, 5 OKTOBER 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL

PANITERA



RUDI SAFARI, S.H, M.H

NIP. 196606091996031002

